



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KE-7
MASA SIDANG II - TAHUN SIDANG 2005-2006**

Gedung Nusantara V, 14 November 2005

1. Pembukaan Sidang Paripurna DPD Ke-7 Tahun Sidang 2005-2006

- Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ... orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, kuorum telah tercapai, dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
- Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna Ke-7 Dewan Perwakilan Daerah ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Agenda Pokok Sidang Paripurna Ke-7 DPD Tahun Sidang 2005-2006

Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna Ke-7 DPD ini mempunyai 2 (dua) agenda pokok yaitu:

- Pembukaan Masa Sidang II DPD Tahun Sidang 2005-2006, dan sesuai dengan ketentuan akan disampaikan Pidato Pembukaan oleh Pimpinan DPD;
- Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari masing-masing Provinsi.

3. Berdoa

Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memasuki agenda pokok Sidang Paripurna ke-7, dalam suasana yang masih diliputi hari Raya Idul Fitri ini kami ingin menyampaikan ucapan *Minal Aidin Wal Faidzin*, mohon maaf lahir dan batin kepada para anggota DPD dan umat Islam di seluruh tanah air. Seiring dengan itu, kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, terutama sehubungan dengan tantangan-tantangan berat yang dihadapi bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada bangsa kita agar dapat melalui berbagai tantangan dan menjadikan bangsa Indonesia kukuh kuat serta hidup damai dan sejahtera.

Untuk itu, kami mohon Kiai..... dari berkenan memimpin doa.

4. Pidato Pembukaan Masa Sidang II DPD Tahun 2005-2006.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita bersama dalam memasuki Masa Sidang Tahun 2005-2006.

- Satu hari memasuki kegiatan anggota DPD di daerah pemilihannya masing-masing, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2005, bangsa Indonesia dan bahkan masyarakat internasional kembali tersentak dengan peristiwa peledakan bom yang untuk kedua kalinya terjadi di Provinsi Bali.

Kita semua sungguh sangat menyesalkan dan mengutuk tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut yang telah menelan korban sedikitnya 26 orang tewas dan lebih dari 100 orang luka-luka baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing, di samping menimbulkan pula kerugian harta dan benda yang tidak sedikit. Lebih jauh peristiwa tersebut telah berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi, sosial, psikologi, dan keamanan masyarakat Bali, serta menodai citra Indonesia di mata internasional.

- Salah satu wujud kepedulian DPD sebagai suatu lembaga yang mewakili daerah, satu hari setelah peristiwa ledakan, Pimpinan dan beberapa anggota DPD melakukan kunjungan ke Bali untuk menyaksikan dari dekat lokasi kejadian serta mengunjungi dan berdialog langsung dengan para korban yang berada di rumah sakit.

Selain itu, Pimpinan DPD juga membentuk sebuah tim yang bertugas membantu pemulihan masyarakat Bali terutama kondisi psikologis, keamanan, dan ekonomi. Penanggung jawab tim ini adalah Pimpinan DPD dengan para pengarah dari unsur Pimpinan PAH dan pelaksana adalah para anggota DPD yang berasal dari Provinsi Bali, yaitu Saudara I Wayan Sudirta, SH (koordinator), Saudara Nyoman Rudana (wakil koordinator), Saudara Drs. Ida Bagus Gede Agastia (sekretaris), dan Saudari Dra. Ida Ayu Agung Mas (bendahara).

Tim ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 2005 dengan masa tugas selama 1 bulan, namun masa tugasnya dapat diperpanjang disesuaikan dengan perkembangan. Masa tugas 1 bulan tersebut saat ini telah terlampaui, untuk itu kami mengharapkan tim dapat menyampaikan laporan kepada Pimpinan DPD sebagai bahan pertimbangan apakah masa tugas tim ini sesuai dengan kebutuhan perlu diperpanjang atau dipandang telah cukup.

- Terkait dengan kerja keras pihak kepolisian dalam mengungkap jaringan dan menangkap pelaku utama berbagai aksi teror yang terjadi di tanah air, *Alhamdulillah* saat ini mulai menampakkan hasilnya. Beberapa hari yang lalu di daerah Batu-Malang, pihak kepolisian kita telah berhasil menyergap sekelompok teroris dan menewaskan salah satu pelaku utama pengeboman di daerah-daerah.

Atas prestasi tersebut, kita semua patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan harapan kiranya hal ini merupakan awal pemberantasan aksi terorisme di Indonesia.

Anggota Dewan yang kami hormati,

- Upaya pemulihan masyarakat Bali pasca ledakan bom akan terasa semakin berat. Hal ini mengingat beberapa jam sebelumnya Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harga BBM yang bervariasi hingga mencapai rata-rata di atas 100%.

Kenaikan harga BBM sebesar ini tentu sangat memberatkan masyarakat, terutama rakyat miskin. Dikhawatirkan kenaikan tersebut dapat menimbulkan stagflasi yang akan menambah berat beban rakyat. Dana kompensasi subsidi BBM yang disalurkan Pemerintah bagi rakyat miskin yang diharapkan mampu mengurangi beban tersebut, namun masih dipandang belum memadai jika dibandingkan dengan tingginya kenaikan harga BBM yang diikuti pula dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan lainnya.

- Pendistribusian dana kompensasi subsidi BBM juga merupakan masalah tersendiri yang perlu penanganan serius, khususnya dalam pendataan rakyat miskin yang berhak menerima dana tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini telah menimbulkan masalah di beberapa daerah yang tidak sedikit mengakibatkan perselisihan dan tindak kekerasan.

Terkait dengan itu, kami memandang kiranya perlu kita pikirkan bersama mengenai alternatif lain dalam pendistribusian dana kompensasi BBM, seperti dengan menciptakan berbagai kegiatan padat karya yang akan memacu produktivitas masyarakat di samping meningkatkan daya belinya.

- Dalam kaitan ini, sebagaimana yang telah kami pesankan dalam penutupan Masa Sidang I DPD yang lalu, kiranya para anggota DPD telah mengawasi pelaksanaan pendistribusian dana kompensasi subsidi BBM di provinsinya masing-masing dan dapat melaporkan dalam Sidang Paripurna ini untuk menjadi perhatian kita semua terutama PAH II sesuai dengan bidang tugasnya.
- Masalah lain yang perlu terus menjadi fokus perhatian DPD adalah menyangkut daerah konflik, rawan konflik, dan pasca konflik yang berpotensi memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Dalam kaitan ini, adanya konflik dan tindak kekerasan di beberapa daerah seperti yang terjadi di Poso perlu mendapatkan perhatian kita semua. Dalam upaya menangani masalah tersebut, sudah saatnya pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat Poso dan berbagai pihak yang terkait melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program-program untuk rekonsiliasi dan pembangunan kembali Poso; pembangunan kembali Poso pasca konflik, yang mengacu pada pasal-pasal Deklarasi Malino untuk Poso, harus ditangani secara khusus dan lebih terpadu; serta Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan harus dilaksanakan tanpa pandang bulu agar Poso benar-benar menemukan kembali kedamaian, keamanan, dan ketentramannya.

Upaya lainnya, Pemerintah perlu memfasilitasi pemerintah daerah (c/q Kanwil Depag Prov. Sulawesi Tengah dan Kandep Agama Kabupaten Poso) maupun lembaga-lembaga keagamaan yang ada, untuk melaksanakan program-program merajut kembali kerukunan hidup antar-golongan di dalam masyarakat, khususnya antar-golongan umat beragama.

Sehubungan dengan itu, DPD perlu menurunkan Tim ke Poso di bawah koordinasi PAH I untuk memantau perkembangan penanganan konflik dan melakukan pengawasan serta verifikasi atas penggunaan dana Pemerintah untuk melaksanakan program rekonsiliasi berdasarkan Deklarasi Malino untuk Poso. Program itu telah dilaksanakan kurang lebih 3 tahun dengan menggunakan dana dalam jumlah yang besar.

- Berbagai konflik dan permasalahan yang dihadapi di Provinsi Papua perlu pula secara seksama diikuti perkembangannya untuk selanjutnya dibahas serta diupayakan mencari pemecahannya dalam forum-forum DPD, khususnya di PAH I. Dalam kaitan ini, DPD perlu terus mendorong Pemerintah agar permasalahan yang dihadapi saudara-saudara kita di Provinsi Papua segera diselesaikan. Di antara berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah belum memadainya kesempatan untuk memberdayakan diri secara maksimal sehingga masyarakat Papua belum dapat memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, serta berbagai hal lainnya dalam rangka otonomi khusus.

Kita bergembira, penantian panjang masyarakat Papua untuk membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2005 dengan dilantiknya 42 orang anggota MRP yang terdiri atas unsur masyarakat adat, perempuan, dan agama.

Kita semua perlu mendukung kehadiran MRP tersebut, dan berharap MRP dapat segera melaksanakan tugasnya serta bahu-membahu bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun Provinsi Papua guna mengejar ketertinggalan pembangunan selama ini. Kita berharap pula, kiranya berbagai permasalahan yang menyangkut hak-hak dasar orang asli Papua dapat segera terselesaikan dan otonomi khusus yang telah diberikan dapat dilaksanakan secara optimal.

- Hal lain yang perlu menjadi perhatian PAH I dan juga kita semua adalah mengenai penyelenggaraan Pilkada yang masih akan berlangsung pada bulan November dan Desember ini. Beberapa kejadian pelaksanaan Pilkada yang lalu, yakni terjadinya pandangan berbeda secara tajam, kerusuhan yang menimbulkan berbagai kerusakan, serta berbagai kelemahan lainnya, agar diupayakan tidak terjadi di daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
- Masalah lainnya yang juga perlu mendapat perhatian pada Masa Sidang II ini adalah mengenai masalah kesehatan masyarakat, terutama berkenaan dengan wabah penyakit flu burung yang

menyerang peternakan unggas dan bahkan telah menularkannya kepada manusia yang diantaranya menyebabkan kematian, serta dikhawatirkan menimbulkan pandemi flu manusia. Untuk itu, kita perlu memantau upaya penanganan dan pencegahan lebih lanjut mengenai wabah penyakit tersebut. Masalah kesehatan lainnya seperti kasus busung lapar dan gizi buruk serta penyakit polio walaupun akhir-akhir ini tidak diberitakan, juga tidak boleh luput dari perhatian kita bersama, khususnya PAH III mengingat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPD yang telah diperbaharui PAH III memiliki ruang lingkup tugas yang meliputi urusan masyarakat di bidang kesehatan.

- Selain itu, PAH III perlu terus memperhatikan masalah yang terkait dengan pendidikan, terutama menyangkut masalah kesejahteraan guru, fasilitas belajar-mengajar, serta penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Di bidang keagamaan, PAH III perlu pula memperhatikan masalah kerukunan antar umat beragama dan pembangunan rumah ibadah. Seiring dengan itu, terus berupaya menyelesaikan pembahasan mengenai RUU tentang Badan Hukum Pendidikan, RUU tentang Guru, serta RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Pada saat kita melaksanakan kegiatan di daerah, tanggal 20 Oktober 2005, Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD perihal Permintaan Pertimbangan Tertulis atas RUU di bidang Perpajakan yang meliputi 3 (tiga) RUU yaitu RUU tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, RUU tentang Pajak Penghasilan, dan RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Mengingat pembahasan ketiga RUU tersebut akan segera dilakukan oleh DPR, kami mengharapkan PAH IV yang membidangi masalah Pajak untuk segera melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan pertimbangan DPD atas RUU tersebut, sejak awal masa persidangnya agar kita dapat memberikan pertimbangan yang matang dan berpijak pada aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah-daerah.

Mengingat pula masalah ini di samping merupakan bidang tugas PAH IV juga terkait dengan bidang tugas PAH II yaitu pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya yang mencakup kegiatan dunia usaha. Oleh karena itu, maka dalam pembahasan RUU tersebut perlu ada koordinasi antara PAH IV dan PAH II, serta dapat mengikutsertakan PPUU yang membidangi masalah perundang-undangan.

- Tugas lain PAH IV yang penting dalam masa sidang kali ini adalah menyelesaikan bahan pertimbangan DPD atas RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 yang pada masa sidang yang lalu belum sempat terselesaikan.
- Terkait dengan perumusan visi, misi, dan rencana strategis DPD sebagaimana yang telah dilokakaryakan beberapa waktu yang lalu, kami mengharapkan agar Panmus dapat segera menyelesaikannya. Visi, misi, dan rencana strategis DPD tersebut merupakan pegangan dan pedoman yang dapat memberikan arah bagi anggota dan alat-alat kelengkapan DPD dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPD, Panmus juga kami harapkan segera menyelesaikan penyusunan mekanisme kerja DPD.
- Kalau tadi kami hanya menyebut beberapa kegiatan DPD ke depan yang penting untuk kita prioritaskan, tidak berarti yang lain-lain tidak penting atau tidak menjadi prioritas. Panitia-panitia Ad Hoc harus kita gerakan agar sungguh-sungguh berfungsi sebagai mekanisme utama kita dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepada DPD. Rapat-rapat kerja dengan Menteri, rapat dengar pendapat dengan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun masyarakat harus makin diintensifkan dengan agenda-agenda yang jelas dan fokus.

Dalam waktu dekat Panitia Perancang Undang-Undang yang telah menghasilkan Peraturan Tata Tertib DPD yang lebih baik, diharapkan dapat segera menyempurnakannya dengan mengakomodasi beberapa masukan yang disampaikan para anggota pada Sidang Paripurna yang lalu.

Dalam rangka mengenalkan lembaga DPD dan menjalin hubungan dengan lembaga perwakilan, Panitia Kerjasama Antarlembaga Perwakilan perlu terus berupaya agar bersama-sama BKSAP DPR dapat turut serta dalam kerjasama-kerjasama internasional antarparlemen.

Panitia Urusan Rumah Tangga harus terus berupaya menangani kebutuhan dan kesejahteraan anggota dan karyawan DPD, masalah anggaran, dan organisasi Sekretariat Jenderal. Perlu kami sampaikan bahwa untuk jabatan Wakil Sekretaris Jenderal DPD telah terpilih yaitu Saudara Drs. Djahur Hidayat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 173/M Tahun 2005. Saat ini organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal MPR sudah disampaikan kepada Menpan dan kami harapkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal DPD telah terbentuk berikut personilnya.

Badan Kehormatan juga harus kita fungsikan dalam rangka menjaga harkat dan martabat kita sebagai anggota DPD serta untuk menegakkan Kode Etik DPD.

Terkait dengan tekad kita untuk membangun peran DPD agar dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dan daerah, agar terus dilakukan oleh Kelompok DPD di MPR. Keterlibatan Kelompok Anggota DPD dalam Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR merupakan kesempatan bagi kita untuk lebih memahami berbagai produk MPR termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu, kita dapat lebih meyakini bahwa melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hal yang mustahil, jika kita berupaya keras dan mengikuti mekanisme yang ada serta dapat menyakinkan berbagai pihak, *Insyah Allah* perubahan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang terkait dengan pengaturan tentang DPD dapat dilakukan.

Anggota Dewan yang kami hormati,

- Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2005, Pimpinan DPD didampingi unsur pimpinan PAH dan PPUU telah melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan DPR yang juga dihadiri oleh unsur pimpinan alat kelengkapan DPR. Agenda utama pertemuan tersebut adalah penyerahan hasil Keputusan DPD kepada DPR. Penyerahan hasil tersebut merupakan bentuk salah satu pelaksanaan amanat konstitusi yang mengharuskan DPD menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan pula mengenai tindak lanjut dari rencana penyusunan mekanisme kerja bersama antara DPR dan DPD yang akan dilakukan oleh Tim 25 (yaitu 14 orang anggota DPR dan 11 orang anggota DPD). Dalam kaitan ini, kami mengharapkan agar para anggota DPD yang telah ditetapkan sebagai anggota Tim tersebut dapat mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan.

- Sebagai tindak lanjut dari Komitmen Bersama antara Pimpinan DPD bersama Pimpinan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Pimpinan Badan Kerjasama DPRD, pada tanggal 7 Oktober 2005 diadakan pertemuan antara Pimpinan DPD beserta unsur Pimpinan alat-alat kelengkapan DPD dan Pimpinan APPSI beserta jajarannya guna membahas rencana program kerja sama. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, kemudian diadakan pertemuan kembali antara Saudara Ir. Sarwono Kusumaatmadja dan Sekjen APPSI untuk membahas teknis kerja sama antara DPD dan APPSI, dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - Untuk menyelesaikan RUU tentang Kepelabuhanan perlu dibentuk suatu kepanitiaan yang terdiri atas unsur *Steering Committee* yaitu para anggota DPD dan tokoh politik, sedangkan unsur *Organizing Committee* yaitu Sekretariat APPSI, Sekretariat Jenderal DPD, unsur-unsur komunitas maritim, serta para profesional. Susunan kepanitiaan ini akan dibicarakan bersama oleh Pimpinan DPD dan Ketua APPSI.
 - Tugas kepanitiaan ini adalah menyusun Draft Akademik, menyusun Rancangan RUU Kepelabuhanan, dan memberikan masukan-masukan substantif untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja DPD dan para pihak. Dalam menyelesaikan tugasnya, Kepanitiaan akan

melaksanakan kegiatan antara lain Sosialisasi, Kunjungan Kerja, dan Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan media.

5. Acara Ketiga, Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari setiap Provinsi.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf f dan Pasal 145 huruf a Peraturan Tata Tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD.
- Penyampaian hasil kegiatan di daerah dari setiap Provinsi, sesuai dengan jadwal acara akan dilaksanakan pada hari ini dan besok. Pada hari ini, kami akan mendahulukan kepada wakil-wakil dari provinsi yang telah siap menyampaikan laporan hasil kegiatan di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing Provinsi dapat mempersiapkan laporannya dengan sebaik mungkin.
- Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kesepakatan bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing Provinsi adalah maksimal 10 menit. Laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada Pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Selanjutnya Pimpinan DPD, melalui Sekretariat Jenderal, akan mengolah laporan tersebut dan meneruskannya kepada alat-alat kelengkapan DPD untuk ditindaklanjuti.

6. Penutupan Sidang Paripurna ke-7 DPD

- Sebelum menutup Sidang Paripurna ke-7 ini, perlu kami ingatkan bahwa Masa Sidang II DPD akan berlangsung sangat singkat, yaitu dari tanggal 14 November 2005 sampai dengan 16 Desember 2005 (25 hari kerja). Oleh sebab itu, kami menghimbau agar waktu yang singkat ini dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin.
- Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Sidang Paripurna ke-7 kami tutup.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh.
